

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Koran Tempo

Wilayah Berita : BPK

Halaman 3

Syafruddin Ditahan

JAKARTA - KPK menahan tersangka kasus korupsi BLBI Syafruddin Arsjad Temenggung.

Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu terseret kasus korupsi pemberian surat keterangan lunas (SKL) kepada obligor BLBI, yakni Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada 2004. Syafruddin menyatakan akan mengikuti prosedur hukum. "Saya akan patuh dengan semua aturan yang ada," ucap Syafruddin setelah menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (21/12).

Dia mengaku sudah melaksanakan tugas sesuai prosedur, termasuk surat keterangan lunas (SKL) yang dia teken untuk pengendali saham BDNI.

"Sudah sesuai dengan yang diaudit BPK dan semua sudah dikerjakan sebaik-baiknya. Semua sudah ada persetujuan dari Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KSKS) dan semua.

Saya hanya mengikuti aturan, dan saya punya acuan," katanya.

Dia kemudian menyerahkan keterangan tertulis soal pembealaannya kepada wartawan. Dia juga menunjukkan buku bersampul kuning *Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham*.

"Semua sudah mengatakan bisa dilaksanakan. Dan masalah hak tagih Rp 4,8 triliun yang dipermasalahkan KPK itu sudah saya serahkan kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan yang menjual itu dengan harga Rp 220 miliar, bukan saya. Jadi semua sudah *clear*," kata dia.

Dia yang telah mengenakan rompi tahanan KPK warna oranye itu kemudian masuk ke dalam mobil tahanan dan dibawa ke rutan. "Syafuruddin ditahan di Rutan KPK untuk 20 hari ke depan," ujar Kabag Pemberitaan dan Publikasi Priharsa Nugraha.

Dalam kasus ini, Syafruddin menjadi tersangka terkait penerbitan SKL terhadap Sjamsul Nursalim, pemegang saham pengendali BDNI.

Membengkak

KPK menyebut Syafruddin mengusulkan agar KSKS menyetujui perubahan atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN Rp 4,8 triliun.

Dalam audit terbaru BPK, KPK menyebut nilai kerugian keuangan negara dalam kasus ini membengkak jadi Rp 4,58 triliun. Nilai itu disebabkan Rp 1,1 triliun yang dinilai *sustainable*, ternyata hanya bisa dilelang Rp 220 miliar. Sisanya, Rp 4,58 triliun menjadi kerugian negara.

KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap seorang saksi dalam kasus sama. Dia adalah Herman Kartadinata alias Robert Bono. Herman sudah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan sejak 2 November lalu. (dtk-50)